

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

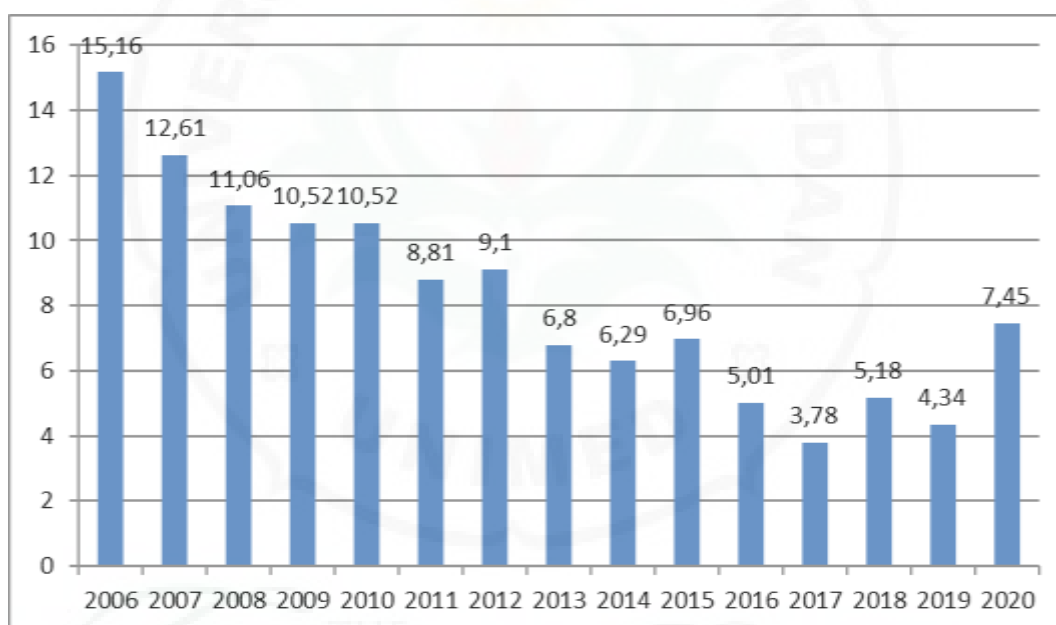
Pembangunan umumnya menyangkut tentang pertumbuhan terhadap sesuatu, namun saat ini pembangunan juga dapat diartikan sebagai perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Permasalahan pembangunan ekonomi di negara berkembang adalah ketidakmampuan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki terkait hal sumber daya manusia juga sumber daya alam. Salah satu dampak dari ketidakmampuan potensi sumber daya manusia ini adalah terciptanya pengangguran. Menurut S. Sukirno (2016) keadaan seseorang tergolong dalam angkatan kerja dan kemudian ingin memiliki pekerjaan tetapi belum mendapatkannya disebut sebagai pengangguran.

Salah satu penyebab pengangguran adalah lebih rendahnya lapangan pekerjaan dibanding dengan angkatan kerja yang semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus berusaha dalam penciptaan lapangan kerja serta peluang kerja bagi masyarakatnya demi membangun perekonomian. Dalam hal ini, daerah juga berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi negaranya.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (2020) pengangguran yang memiliki usia 15 tahun ke atas di Kota Padang Sidempuan pada tahun 2020 mencapai angka 8.986 jiwa, hal ini mengalami peningkatan hampir 50% dari jumlah pengangguran pada tahun 2019 sebesar 4.873 jiwa. Oleh karena itu, masalah pengangguran menjadi masalah serius yang memerlukan penanganan

khusus dari pemerintah khususnya pemerintah daerah itu sendiri. Pemerintah juga menyadari bahwa pengangguran yang tinggi akan mempersulit kegiatan ekonomi (Feriyanto, 2014:25).

Salah satu indikator yang biasa dipakai dalam mengukur pengangguran adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Mahroji & Nurkhasanah (2019) mengemukakan bahwa untuk melihat pengangguran yang termasuk dalam jumlah penduduk usia kerja dapat dilihat dari berapa besarnya nilai TPT.



Gambar 4.1 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021) diolah.

Gambar 1.1 di atas menjelaskan bahwasanya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Padang Sidempuan terjadi fluktuatif yang tidak terlalu tajam, dimana penurunan nilai TPT pada tahun 2006 turun dari 15,16% hingga mencapai 8,81% di tahun 2011 dan terus-menerus mengalami fluktuasi setiap tahunnya sampai di tahun 2017 berada di posisi terendah yakni 3,78% sebelum mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada tahun 2020 senilai 7,45%.

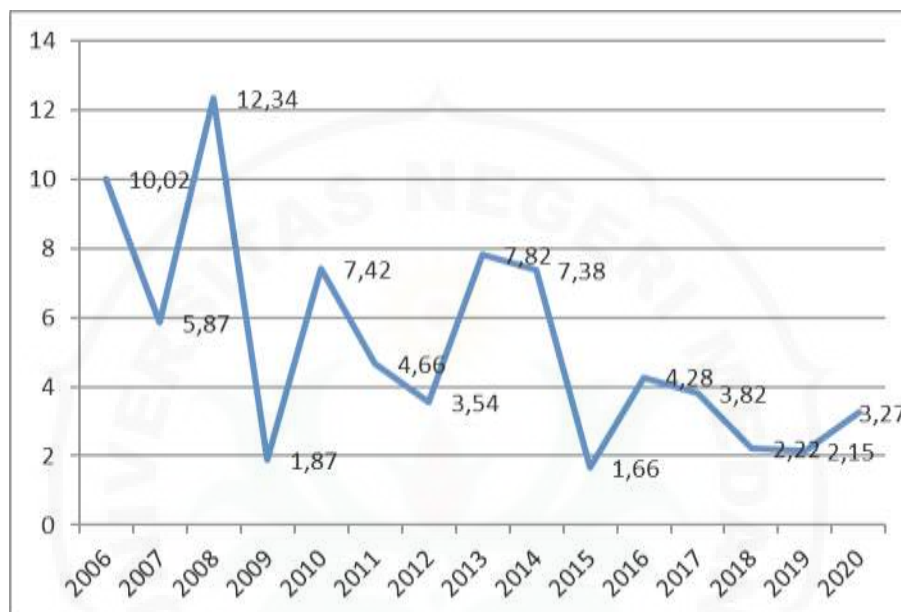
Kenaikan tingkat pengangguran terbuka di Kota Padang Sidempuan pada tahun 2020 terjadi disebabkan pandemi Covid-19 yang masih melanda dan berdampak pada ekonomi masyarakat dan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pengangguran yang mengalami fluktuatif ini menggambarkan belum berhasilnya pemerintah dalam menangani masalah pengangguran khususnya di Kota Padang Sidempuan. Meningkatnya perekonomian suatu daerah akan ditandai dengan tingkat pengangguran yang semakin menurun setiap tahunnya. Seperti yang dijelaskan oleh Helvira & Rizki (2020) bahwa pembangunan pada ekonomi daerah bertujuan pada proses dimana pemerintah daerah bekerjasama dengan masyarakat lokal dan sektor swasta guna mengelola sumber daya yang tersedia, guna mewujudkan lapangan kerja baru serta mengembangkan ekonomi lokal. Dengan demikian, diperlukan tindakan khusus dari pemerintah daerah terkait masalah tingkat pengangguran yang terjadi pada masing-masing daerahnya.

Salah satu dari beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pengangguran adalah inflasi. Seperti telah dijelaskan oleh Sukirno (2012) bahwa pentingnya menghindari inflasi karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kegiatan perekonomian yang menyebabkan ketidakstabilan, lambatnya pertumbuhan dan meningkatnya pengangguran.

Inflasi yang menimbulkan berbagai dampak terhadap perekonomian khususnya pengangguran perlu di perhatikan. Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa inflasi ialah cenderung naiknya harga-harga komoditi dan jasa secara berkelanjutan.

Berikut adalah gambaran tingkat inflasi di Kota Padang Sidempuan pada tahun 2006-2020:



Gambar 4.2 Persentase Tingkat Inflasi Kota Padang Sidempuan
Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Dapat kita perhatikan pada grafik di atas bahwa tingkat inflasi Kota Padang Sidempuan terus mengalami fluktuasi, tahun 2006 tingkat inflasi berada pada angka 10,02% kemudian naik pada tahun 2007 sebesar 12,34% yang selanjutnya terjadi penurunan yang cukup signifikan di tahun 2008 dan 2009 mencapai 1,87% kemudian mengalami fluktuasi dari tahun 2010 hingga tahun 2020 mencapai nilai 3,27%. Jenis inflasi yang terjadi pada tahun 2008 hingga tahun 2010 menurut sifatnya ini tergolong ke dalam inflasi merayap, sedangkan pada tahun 2006 dan 2007 tergolong inflasi menengah. Seperti yang dijelaskan oleh Feriyanto (2014) bahwa *Creeping Inflation* (inflasi merayap) berciri angka inflasi tidak lebih dari 10% dan *Galloping Inflation* (inflasi menengah) yang berciri yakni nilai inflasi lebih dari 10% hingga 300%.

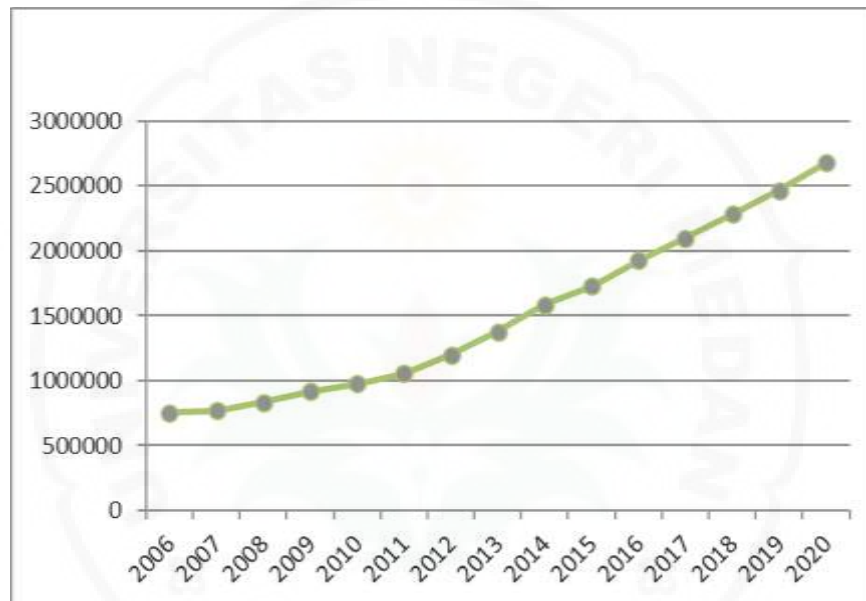
Selain inflasi, permasalahan yang terus-menerus terjadi dalam ketenagakerjaan dan juga mempengaruhi pengangguran salah satunya adalah upah. Seperti yang dikatakan Mankiw (2007) salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran adalah upah. Studi yang dilakukan oleh A.W. Philips dalam meneliti sifat hubungan antara tingkat pengangguran serta kenaikan upah yang menyimpulkan kenaikan tingkat upah berhubungan negatif dengan tingkat pengangguran (Sadono Sukirno, 2012).

Keadaan tingkat upah juga perlu di perhatikan untuk mengetahui kondisi pengupahan di suatu daerah. Feriyanto (2014) menjelaskan bahwa kepala daerah yakni Gubernur menetapkan upah minimum bagi wilayah tingkat provinsi, sedangkan Bupati/Walikota menetapkan upah minimum pada bagian Kabupaten/Kota, dengan merujuk rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi atau Kabupaten/Kota. Upah alam penetapan upah, terdapat standar upah minimum yang di tetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan faktor tingkat inflasi juga pertumbuhan ekonomi yang dikatakan dengan Upah Minimum Regional (UMR) dan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Tenaga kerja yang selalu menginginkan pendapatan yang tinggi dengan kenaikan tingkat upah, tentunya harus diiringi dengan kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Jika sumber daya manusia memiliki produktivitas yang baik maka perusahaan tidak akan merasa rugi dengan meningkatkan jumlah tenaga kerjanya, dalam hal ini maka upah akan memberikan dampak negatif terhadap tingkat pengangguran. Umar dkk (2020) menyimpulkan upah dapat berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran, dalam hal ini tenaga kerja berkontribusi

dalam menetapkan upah minimum dimana jika nilai upah tidak sesuai, maka pekerja tidak menerima yang kemudian menyebabkan pengangguran.

Berikut grafik upah minimum kota (UMK) Padang Sidempuan dari tahun 2006-2020:



Gambar 4.3 Upah Minimum Kota (UMK) Padang Sidempuan
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Padang Sidempuan

Berdasarkan gambar 1.3 upah minimum kota Padang Sidempuan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya, dimana nilai UMK pada tahun 2006 diawali dengan Rp 756.000 hingga mencapai Rp 2.676.209 pada tahun 2020, hal ini menandakan bahwa kebutuhan hidup pekerja yang terus meningkat setiap tahunnya. Upah yang terus meningkat di Kota Padang Sidempuan berbalik dengan grafik tingkat pengangguran, dapat diartikan bahwa upah minimum memiliki hubungan negatif dengan tingkat pengangguran. Penentuan pantas nya UMR atau UMP diantaranya yakni pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, dan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) pekerja (Feriyanto, 2014).

Berdasar kepada penelitian sebelumnya oleh Soeharjoto dan Oktavia (2021) menjelaskan bahwasanya inflasi dan IPM memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia, sedangkan UMP tidak signifikan terhadap pengangguran di Indonesia. Selanjutnya, penelitian Silaban dkk (2020) menghasilkan bahwa secara bersama-sama berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengangguran di Sumatera Utara pada tahun 2003-2019.

Sedangkan menurut penelitian Sembiring & Sasongko (2019) PDRB, inflasi dan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran di Indonesia pada tahun 2011-2017. Namun penelitian Angga (2020) menjelaskan dalam penelitiannya menjelaskan bahwa UMP berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengangguran di Aceh sedangkan IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Menurut latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penelitian ini memiliki tujuan yakni mengukur dan menjelaskan bagaimana pengaruh dari inflasi dan upah minimum kota (UMK) terhadap tingkat pengangguran terbuka. Oleh sebab itu, penulis berinisiatif untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Inflasi dan Upah Minimum Kota (UMK) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Padang Sidempuan”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berlandaskan latar belakang masalah yang telah dicantumkan, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Tingkat pengangguran Kota Padang Sidempuan berfluktuatif pada setiap tahunnya dan mengalami kenaikan yang cukup tajam di tahun 2020.
2. Inflasi Kota Padang Sidempuan terus mengalami fluktuasi.
3. Upah minimum yang rendah menjadi permasalahan bagi tenaga kerja, sedangkan upah minimum yang tinggi menjadi permasalahan bagi penguhasa menyebabkan terjadinya pengangguran.
4. Masalah pengangguran di Kota Padang Sidempuan belum dapat ditangani baik oleh pemerintah daerah.

1.3 Batasan Masalah

Untuk memusatkan serta mendalami penelitian, penulis memperkecil cakupan pembahasan dalam penelitian ini. Cakupan pembahasan dalam penelitian ini yakni berkaitan dengan Inflasi dan Upah Minimum Kota (UMK) yang dapat mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Padang Sidempuan pada tahun 2006-2020.

1.4 Rumusan Masalah

Merujuk pada pembatasan masalah yang dibuat, dirumuskan masalah agar lebih terperinci dan terarah. Berikut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh antara Inflasi terhadap tingkat pengangguran di Kota Padang Sidempuan ?
2. Bagaimana pengaruh antara Upah Minimum Kota (UMK) terhadap tingkat pengangguran di Kota Padang Sidempuan ?

3. Bagaimana pengaruh Inflasi dan UMK terhadap tingkat pengangguran di Kota Padang Sidempuan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap tingkat pengangguran di Kota Padang Sidempuan.
2. Untuk mengetahui pengaruh UMK terhadap tingkat pengangguran di Kota Padang Sidempuan.
3. Serta mengetahui secara bersama-sama pengaruh antara Inflasi dan UMK terhadap tingkat pengangguran di Kota Padang Sidempuan.

1.6 Manfaat penelitian

Berikut manfaat dari penelitian ini diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Guna mengembangkan wawasan peneliti mengenai pengaruh Inflasi dan UMK terhadap pengangguran, juga untuk syarat dalam menyelesaikan program sarjana ekonomi Universitas Negeri Medan.

2. Bagi Universitas

Agar penelitian ini dapat menjadi pedoman belajar dan sumber referensi bacaan di perpustakaan Universitas Negeri Medan serta dapat digunakan untuk kepentingan ilmiah dan kontribusi untuk peneliti terkait pengangguran di masa depan untuk menambah informasi serta bermanfaat bagi ilmu pengetahuan.

3. Bagi Masyarakat

Untuk mengkaji apa saja yang mempengaruhi pengangguran khususnya Inflasi dan UMK yang dapat mempengaruhi pengangguran dan penelitian ini bisa bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya.

